



**BULETIN**

# **PARLEMENTARIA**

NOMOR: 775/VI/2013

III/JUNI 2013



## **Rapat Paripurna DPR Sahkan Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara**

# KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA JUNI 2013

Minggu ketiga bulan Juni ini, kegiatan Dewan ditandai dengan Rapat Paripurna tanggal 11 Juni, dengan agenda antara lain penyampaian hasil pemeriksaan BPK, pengambilan keputusan RUU pembentukan wilayah Musi Rawas Utara, dan penetapan calon anggota BPKN. Berikut rangkumannya:

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

## Rapat Paripurna 11 Juni 2013

Rapat Paripurna 11 Juni memiliki 4 agenda acara, namun sebelumnya, diberitahukan surat masuk dari Presiden, diantaranya perihal penyampaian RUU tentang perubahan atas UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan perpanjangan dan calon anggota Komisi Informasi Pusat periode 2013-2017 dan usul Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Pada agenda pertama, Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012, Ketua BPK melaporkan bahwa atas LKPP tahun 2012, BPK memberikan opini **Wajar Dengan Pengecualian** (*qualified opinion*). Opini tersebut sama dengan opini yang diberikan BPK atas LKPP tahun 2011. Pada tahun 2012, Pemerintah telah melakukan perbaikan signifikan dengan melakukan peningkatan ketertiban dalam inventarisasi penilaian pencatatan aset tetap dan aset lainnya. Laporan BPK ini untuk memenuhi amanat UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, khususnya paket UU Keuangan Negara serta UU tentang BPK. Laporan hasil pemeriksaan atas LKPP 2012, disampaikan terdiri dari 6 buku, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

BPK mengungkapkan, masih ada kelemahan pengendalian dalam belanja bantuan sosial. Meskipun Pemerintah telah memperbaiki, namun dalam pemeriksaan tahun 2012 masih ditemukan permasalahan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial



sebesar Rp. 31,66 triliun. Sebagian masalah tersebut ada yang berpengaruh terhadap kewajaran laporan keuangan. Ada belanja bantuan sosial yang digunakan untuk pengadaan sarana/prasarana dan belanja operasional Satker Pemerintah Pusat/Daerah, yang tidak sesuai dengan hakekat belanja bantuan sosial. Atas hal tersebut, Pemerintah perlu menetapkan kualifikasi anggaran dalam DIPA sesuai dengan ketentuan, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran penggunaan bantuan sosial, serta membuat aturan yang tegas tentang kriteria penggunaan belanja bantuan sosial, mekanisme pertanggungjawaban dan perlakuan sisa dana Bansos pada akhir tahun guna memastikan efektifitas dana untuk menanggulangi resiko bantuan sosial.

BPK memberikan penekanan khusus terhadap berlarut-larutnya tindak lanjut atas rekomendasi BPK terhadap penyelenggaraan

dana pensiun PNS. Dalam pemeriksaan atas LKPP tahun 2007 dan 2010, BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah agar menyempurnakan regulasi pengelolaan dana pensiun PNS dan menyusun aturan teknis mengenai tata-cara pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun yang dititipkan Menteri Keuangan kepada PT. Taspen (Persero). Dalam rangka pengelolaan resiko fiskal, perlu ada kejelasan status pengelolaan atas akumulasi potongan dan pensiun yang mencapai RP. 56,52 triliun dengan tetap memperhatikan kesejahteraan PNS. Pemerintah agar segera menetapkan peraturan terkait penyelenggaraan program pensiun PNS.





Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, BPK juga mendorong agar Pemerintah mulai menyusun secara berkala laporan mengenai rancangan dan pencapaian kriteria transparansi fiskal dengan mengacu pada praktek-praktek transparansi fiskal yang baik. Pemerintah diharapkan mengintegrasikan pelaporan kinerja pencapaian program dengan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Sampai dengan 2012, Laporan Kinerja Pemerintah Pusat masih belum diintegrasikan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

**Agenda kedua,** Pembicaraan Tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di provinsi Sumatera Selatan. Mendahului keputusan Rapat Paripurna, Ketua Komisi II melaporkan bahwa pada Raker komisi II dengan Mendagri, Menkumham, Menkeu dan DPD-RI, dengan agenda Laporan Hasil Kerja Panja ke Pleno Komisi, telah menyepakati draft RUU tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya diserahkan kepada Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan tingkat II. RUU ini merupakan 5 RUU sisa pembentukan Daerah Otonom Baru yang harus diselesaikan pada Masa Persidangan IV. Sebelumnya, telah diputuskan 14 RUU dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II dan Masa Sidang III 2012-2013.

Persetujuan atas pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan karena telah ada penyelesaian terhadap segmen-segmen yang bermasalah antara Kabupaten Musi Rawas dan Musi Banyuasin melalui kesepakatan masing-masing pada tanggal 14 Januari dan 9 April 2013 yang difasilitasi Gubernur Sumatera Selatan. Maka persoalan batas antara Kabupaten Musi Rawas dengan Musi Banyuasin dianggap telah selesai. RUU ini terdiri dari 9 bab dengan 22 pasal. Pembentukan Kabupaten Muratara merupakan upaya dalam penataan daerah yang merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik, memperpendek rentang-kendali Pemerintah yang sejalan dengan asas umum pemerintahan yang baik serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik guna mempercepat kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembentukan kabupaten juga diyakini memperkuat dan memperkokoh daya saing sekaligus keutuhan negara. Kabupaten Muratara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Musi Rawas yang terdiri dari cakupan wilayah kecamatan Rupit, Rawas Ulu, Nibung, Rawas Ilir, Karang Dapoe, Karang Jaya, dan Ulu Rawas. Kabupaten Muratara memiliki luas wilayah keseluruhan  $\pm 6.008,55$  km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk  $\pm 195.689$  jiwa pada tahun 2012, dan 89 desa/kelurahan. Terbentuknya kelembagaan DPRD dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan peronel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, menjadi kewajiban Pemerintah Sumatera Selatan untuk memfasilitasinya.

**Agenda ketiga** Laporan Komisi VI mengenai hasil pembahasan Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Indo-

nesia (BPKN) Periode 2013-2016. Ketua Komisi VI melaporkan bahwa Komisi VI telah melakukan *fit and proper test* atas calon-calon anggota BPKN sebagaimana diatur pada pasal 35 ayat 2 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa “anggota BPKN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri setelah dikonsultasikan kepada DPR-RI”. Dalam tahap pembahasan, telah disetujui 23 calon anggota BPKN untuk menjadi anggota BPKN periode 2013-2016 yaitu: (1). Tony TH Sinambela; (2). Harry Boediarso Soewarto; (3). Aizirman Djusan; (4). Widodo; (5). Bambang Sumantri; (6). Yamin Ferryanto; (7). Albert Yusuf; (8). Nurul Yakin; (9). Firman Tumantara; (10). Huzna Gustiana; (11). Susianah; (12). Yusuf Shofi; (13). Bernadette Waluyo; (14). Djainal Abidin; (15). Soemali; (16). Fransiska Rungkat; (17). M Syamsudin; (18). Abustan; (19). Ardyansyah; (20). David Tobing; (21). Atih Surjati; (22). Deddy Saleh; (23). Rifana Erni. Ke-23 calon anggota tersebut memiliki keahlian dan pemahaman yang baik terhadap tugas-tugasnya, dan bisa diandalkan untuk memegang amanah sebagai anggota BPKN yang menjadi pelindung bagi kepentingan konsumen. Namun pada sisi lain, diharapkan pula agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan integritas moral yang tinggi. Rapat Paripurna memberikan persetujuan atas ke-23 calon anggota tersebut untuk ditetapkan menjadi calon anggota BPKN.

**Agenda keempat,** Penetapan Badan Wakaf Indonesia sebagai Pasangan Kerja Komisi VIII DPR-RI. Persetujuan ini didahului dengan pembahasan dalam forum rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dan Pimpinan fraksi-fraksi DPR-RI.

### Pelaksanaan Pengawasan

Laporan Tim Pengawas Century terhadap tindaklanjut rekomendasi panitia angket tentang pengusutan kasus Bank Century. RDP dilakukan oleh tim pengawas dengan KPK pada 5 Juni 2013 dengan agenda membicarakan *progress report* penanganan kasus bank century. Pokok-pokok pembicaraan terbagi dalam laporan Pimpinan KPK, respon dari Tim Pengawas atas laporan KPK, dan kesimpulan. Laporan KPK terdiri dari perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Panjang dan penetapan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik. Penyidik telah berkoordinasi dengan BPK, terkait permintaan audit pengitungan kerugian keuangan negara. penyidik telah melakukan pemeriksaan sksi dampak dengan awal Juni sebanyak 37 orang, berasal dari BI, Kemenkeu, KSSK, LPS dan pihak lain terkait. KPK juga menyampaikan rencana penyidikan yang akan dilakukan tahap berikutnya, antara lain diskusi dengan nara sumber atau ahli hukum dan perbankan. KPK akan terus mengembangkan kasus Bank Century secara profesional dan meminta *second opinion* kepada Ikatan Dokter Indonesia terhadap SCF (pejabat BI). KPK telah memperoleh keterangan signifikan dari Dr. Sri Mulyani, namun belum dapat menyampaikan sepenuhnya karena terikat dengan SOP dan aturan yang berlaku. Laporan dapat disampaikan dalam forum tertutup.

Respon anggota Tim telah disampaikan dalam kesempatan tersebut, terutama berkaitan dengan perspektif hukum langkah-langkah KPK dalam mengungkap kasus Bank

Century, juga dalam proses penegakan hukum terhadap penetapan tersangka tindak pidana korupsi Bank Century. Dan beberapa hal lainnya. Kesimpulan hasil rapat adalah: [1] Timwas Century mendukung upaya yang dilakukan KPK dalam penanganan kasus korupsi, namun Timwas melihat perkembangan yang ada belum signifikan, sementara dokumen dan data telah diserahkan. [2] Timwas mendorong KPK untuk menelusuri pengembalian aset-aset Bank Century yang diperoleh dalam kaitan kasus korupsi Bank Century sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. [3] Timwas akan mengundang KPK untuk mengadakan pertemuan tertutup guna mengetahui perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi Bank Century.

### Diplomasi Parlemen

Ketua DPR RI Marzuki Alie memenuhi undangan Parlemen Serbia, melakukan kunjungan muhibah ke Serbia pada 4-8 Juni. Selama melakukan kunjungan, Ketua DPR-RI dan delegasi melakukan beberapa pertemuan penting dengan Presiden Serbia Tomislav Nikolic, PM Serbia Ivica Dacic, dan Menteri Perdagangan dan Telekomunikasi Serbia Rashim Ljaljic, untuk membuka peluang kerja sama baru di berba-

gai sektor dengan Serbia. Selama di Serbia, delegasi DPR RI mengadakan pertemuan dengan Ketua Parlemen Serbia, Nebojsa Stefanovic, di Gedung National Assembly Serbia, di Kota Beograd.

Presiden Nikolic menyampaikan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Serbia di berbagai sektor yang telah terjalin, dapat terus ditingkatkan bagi kemajuan pembangunan di kedua negara. Hubungan bilateral Indonesia dan Serbia yang senantiasa terbina dengan baik selama 57 tahun dapat dijadikan sebagai faktor pendorong untuk membuka kerja sama yang lebih banyak lagi di berbagai sektor-sektor pembangunan di kedua negara. Selain itu, PM Serbia Ivica Dacic menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Indonesia atas komitmen dan konsistensi dukungan RI terhadap Serbia untuk penyelesaian secara damai bagi Kosovo. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai peran serta aktif DPR-RI dan Parlemen Serbia serta kalangan pemerintahan dalam penekanan hubungan strategis kedua negara yang difokuskan pada kerja sama “Kemitraan Startegis” di sektor politik, sosial budaya, dan khususnya di sektor ekonomi perdagangan untuk mendorong kemajuan pembangunan kedua negara.\*

## Rapat Paripurna DPR Sahkan Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan akhirnya disahkan di Rapat Paripurna DPR yang digelar Selasa (11/6) di Gedung DPR dipimpin oleh Ketua DPR Marzuki Alie.



Jabat tangan se usai Penandatanganan (RUU) Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara disaksikan Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar dan Wakil Ketua Arif Wibowo.

Dalam laporannya, Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa menjelaskan dengan disetujui RUU tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara ini, Komisi II DPR menegaskan bahwa pembentukan daerah otonom baru merupakan suatu upaya dalam penataan daerah, yang merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga

lebih efisien dan efektif sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah.

“Hal tersebut diyakini, semata-mata demi memperkuat, memperkokoh daya saing sekaligus keutuhan Negara Kesatuan RI,”terang politisi dari partai

Golkar ini.

Lebih lanjut ia menambahkan, Komisi II DPR juga meminta Mendagri untuk segera menerbitkan Peraturan Mendagri (Permendagri) terkait dengan Penegasan batas wilayah antara Kabupaten Musi Rawas (termasuk Kabupaten Musi Rawas Utara) dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi dan Kabupaten Sarolangun Provinsi



Jambi.

“Untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Komisi II DPR RI meminta untuk segera mensosialisasikan terhadap penegasan batas wilayah di ke-2 (dua) kabupaten dimaksud kepada masyarakat khususnya di wilayah perbatasan antara ke-2 (dua) kabupaten yang dipermasalahkan tersebut,” ujar Agun.

Sementara itu, dalam sambutannya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi pada Rapat Paripurna mengatakan atas nama Pemerintah mengucapkan selamat atas proses pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara. Menurut Gamawan, penetapan bersama antara Pemerintah dan DPR RI tentang RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) memerlukan pemikiran yang panjang dan pertimbangan yang sangat matang.

“Penyelesaian secara komprehensif terhadap pembahasan RUU tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Prov Sumsel, dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang secara menyeluruh dan pertimbangan berdasarkan peraturan yang berlaku terkait RUU tersebut khususnya masalah batas wilayah yang pada masa sidang lalu belum dapat diselesaikan,” jelasnya.

Selanjutnya, kata Gamawan, permasalahan batas wilayah saat ini telah terselesaikan sebagaimana kesepakatan yang telah dicapai Komisi II DPR dengan Pemerintah, Pemprov Sumsel, Pemprov Jambi, Pemprov Bengkulu, Pemkab Musi Rawas, Musi Banyu Asin dan Sarolangun.

la menambahkan, mengingat masih terdapat beberapa permasalahan yang terungkap pada saat pembahasan, dan sesuai dengan kesepakatan antara DPR RI dan Pemerintah bahwa kriteria pembentukan DOB ini tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta memperhatikan pula faktor geopolitik dan geostrategis, dengan pertimbangan kepentingan masyarakat dan percepatan pembangunan di daerah.

“Oleh karena itu, maka kelengkapan dan ketelitian terhadap dokumen persyaratan yang ada, menjadi fokus perhatian dalam proses pembahasan tersebut dan lebih selektif untuk menentukan calon DOB dengan melihat secara jernih kemampuan daerah induk, dan hasil klarifikasi dan verifikasi faktual dilapangan,” terangnya.

Sebelumnya, pada tanggal 4 Juni 2013 dalam Raker Komisi II DPR dengan Mendagri, MenkumHam, Menkeu dan DPD RI telah dilaksanakan Pengambil-

an Keputusan Tingkat I dengan mendengarkan Pandangan Mini Fraksi-Fraksi, dalam Raker tersebut akhirnya Komisi II dan Pemerintah menyetujui RUU tentang Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam Raker tersebut, Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan pembentukan kabupaten tersebut cukup panjang dimulai pada Juni 2012. Ia mengakui mengatasi wilayah perbatasan tidak mudah. “Pemerintah sangat detail tidak ingin pembentukan otonomi baru meninggalkan persoalan,” kata Agun.

Menurutnya, pemerintah memang sangat detail terkait pembahasan DOB. Hal ini agar dalam pembentukan daerah otonom tidak menyisakan persoalan di kemudian hari.

Ia mengatakan, sejak dibahas mulai Juni 2012, Komisi II DPR mengaku kesulitan menyusun draf RUU Pembentukan Musi Rawas Utara, terutama berkaitan dengan perbatasan. Musi Rawas Utara ternyata belum memiliki batas wilayah yang jelas. Masih ada konflik penetapan batas wilayah dengan beberapa kabupaten induk seperti Musi Banyuasin di Sumatera Selatan dan Kabupaten Sarolangun di Jambi. (nt)/foto:Iwan Armanias/parle.

## Badan Arsip Jateng Bantu Penyelamatan Naskah Kuno Keraton Solo

Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) membantu penyelamatan naskah-naskah dan foto-foto kuno di Keraton Mangkunegaran Surakarta.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jateng, Andriani saat pertemuan dengan Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI dipimpin Ketua Komisi X, Agus Hermanto di kantor Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Jumat (7/6)

Selain ikut mendukung dan menye-

lamatkan naskah-naskah dan foto-foto kuno, kata Andriani, Badan Arsip juga membantu pengarsipannya.

“Sebenarnya Badan Arsip dan Perpustakaan juga berencana membantu melakukan penyelamatan naskah-naskah dan foto-foto kuno di Keraton Kasunanan Surakarta.

Namun, belum dapat dilakukan karena ada hambatan,” jelas Andriani.

Saat ini, menurut Andriani, Badan Arsip dan Perpustakaan Jateng masih fokus pada penyelamatan naskah kuno

di Keraton Mangkunegaran.

Terkait dengan upaya peningkatan minat baca masyarakat di provinsi setempat, dia menjelaskan bahwa Badan Arsip dan Perpustakaan Jateng telah memberikan bantuan berupa 1.000 buku dan rak secara bertahap ke seluruh desa.

“Hingga kini, baru perpustakaan di 7.500 desa dan 600 kelurahan di Jateng yang mendapat bantuan dari kami,” katanya.

Selain itu, katanya, Badan Arsip dan





Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik ke Provinsi Jawa Tengah.

Perpustakaan Jateng juga mempunyai empat unit mobil perpustakaan keliling yang harus menjangkau semua daerah.

“Tahun ini, kami mendapat kesempatan untuk melakukan perubahan pengadaan mobil perpustakaan keliling,” ujarnya

Ia mengklaim sudah ada sekitar 2.500 perpustakaan desa yang mendapat bantuan sarana dan prasarana kearsipan.

“Kami juga memberikan pelatihan tentang pengarsipan kepada sekretaris desa dan perangkat desa yang desanya menerima bantuan dari kami,” kata Andriani. (sc), foto: sc/parle/hr.

## Sekjen DPR Lantik Lima Pejabat

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI melantik 5 (lima) pejabat eselon III di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, di ruang Sekjen, Senin (10/6). Pelantikan berlangsung singkat dengan agenda pengambilan sumpah jabatan, sambutan Sekjen, dan ucapan selamat dari pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI.

Mereka yang dilantik adalah Tri Budi Utami (Kepala Bagian Perancangan Undang-undang Bidang Kesra), Juliasih (Kepala Bagian Sekretariat Badan Legislatif), Tanti Sumartini (Kepala Bagian Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang), Haryanti (Kepala Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Asisten Anggota), dan Wittingsih Yuhelmi (Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Setjen).

Usai pengambilan sumpah para pejabat baru tersebut, Sekjen DPR Winantuningtyastiti mengatakan, pelantikan ini tidak semata-mata mutasi, tapi merupakan pelaksanaan kebijakan penataan organisasi. Tidak mudah menempatkan nama-nama baru di lingkungan kerja Sekretariat Jenderal DPR RI.

Lebih lanjut Sekjen mengungkapkan, dengan jabatan baru ini, akan ada suasana baru di lingkungan kerja



Sekjen DPR Winantuningtyastiti melantik 5 Pejabat Eselon III di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

masing-masing. Motivasi baru bisa muncul dan keluar dari kejenuhan kerja. Bahkan, ide-ide baru, semangat baru, dan teman-teman baru selalu muncul seiring penempatan di lingkungan kerja baru.

Penempatan dan pengangkatan ini tentu akan menimba pengalaman yang lebih dalam untuk menghadapi tantangan-tantangan baru di lingkungan kerja. “Saya berharap, pemindahan ini bentuk penghormatan untuk mampu menjalankan tugas-tugas yang baru,” ucap Sekjen DPR. (mh) Foto:wahyu/parle.

# DPR Akan Undang Menkopolhukam, Mendagri dan Kapolri Bahas Soal Sampang



Menteri Agama, Ketua MUI, Ketua Umum PP. Muhammadiyah, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam pertemuan dengan DPR terkait konflik Sampang.

DPR akan segera memanggil Menkopulhukam, Mendagri, dan Kapolri terkait persoalan konflik Sampang yang menelan korban jiwa.

“Intinya ini bukan persoalan antara Syiah dan Sunni tapi kasus yang ada di politisasi hingga muncul konflik berdarah tersebut. Kita tahu bahwa penganut Syiah di berbagai daerah itu berjalan damai,” ujar anggota DPR KH Mahrus Munir.

Sementara pertemuan Selasa, (11/6), DPR juga telah mengundang Menteri Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

bahas persoalan konflik Sampang. “Pertemuan kali ini intinya dalam rangka tindak lanjut pertemuan DPR dengan IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia) untuk segera menyelesaikan

kasus Sampang,” ujar Mahrus sebelum Rapat Konsultasi yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie, di Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (11/6).

Menurut Mahrus, DPR mengharapkan relokasi bagi para pengungsi dapat segera dilakukan ketempat yang lebih aman. “Pimpinan DPR ingin mengetahui persoalannya, kita juga telah mengunjungi Pemda Jatim, dan Sampang, pada intinya pertemuan kali ini yaitu meminta penjelasan Menteri Agama, MUI, NU dan Muhammadiyah terkait kasus Sampang,” jelasnya.

Dia menjelaskan, kendala saat ini pengungsi Syiah banyak yang menolak untuk dikembalikan ke daerah asalnya. “Mereka berasal tidak ingin kembali ke daerah asalnya,” katanya.

Terkait kasus Sampang, dia menduga adanya oknum yang berusaha untuk mengganggu kerukunan umat beragama di daerah tersebut. “Saya tidak tahu apa motifnya tetapi kelihatan ada oknum yang berusaha merusak kerukunan umat disana,” paparnya. (si/ foto:iwan armanias/parle.

# Komisi VII DPR Undang 10 Dirut KKKS Bahas Produksi Minyak

Komisi VII DPR mengundang 10 Dirut Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang memiliki produksi terbesar di Indonesia mulai dari Pertamina EP, Pertamina ONWJ, Chevron Indonesia, Exxon Mobil, CNOOC, ConocoPhillips, Total E&P Indonesia, PetroChina, BOB PT BSP-Pertamina Hulu, dan Vico.

RDP tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Daryatmo Mardiyanto didampingi oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Achmad Fachrial, di Gedung Nusantara I, Selasa, (11/6).

“Kami mengundang 10 KKKS ini un-



Wakil Ketua Komisi VII DPR Achmad Fachrial.

tuk mengetahui kemampuan masing-masing, atas capaian produksi minyak

bumi pada 2013,” ujar Daryatmo. Selain 10 KKKS yang diundang, hadir pula Vico.

Menurut Daryatmo, kehadiran Vico tak mengurangi inti dari permasalahan *lifting* minyak di tahun 2013. Enggak apa-apalah nyelip satu dalam undangan,” katanya.

Didalam pemaparannya, para Dirut Perusahaan migas mencurahkan berbagai kendala yang dihadapi kepada Komisi VII DPR, Presiden Direktur Chevron Pasifik Indonesia, Abdul Hamid Batubara mengkritisi mengenai



kepastian hukum di Indonesia.

Didalam paparannya terkait kasus bioremediasi Chevron, dia menjelaskan bahwa seluruh persyaratan bioremediasi dari SKK Migas dan

Kementerian Lingkungan Hidup telah terpenuhi namun para jaksa dan hakim tidak sependapat hingga menghukum Chevron karena dianggap tidak bisa mengelola limbahnya.

Berdasarkan data SKK Migas, produksi minyak seluruhnya mencapai 833.200 barel per hari, produksi terbesar disumbang Chevron dengan produksi 324.108 barel per hari. (si)/foto:odjie/parle/iw.

## Pemerintah Diminta Tegas Sikapi Wadah Tunggal Notaris



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung foto bersama Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Pramono Anung Wibowo menegaskan, DPR tidak pernah mau dan tidak ikut campur dalam persoalan persengketaan yang ada di dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). “Kita menyerahkan sepenuhnya penyelesaian oleh mereka sendiri sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku,” katanya saat menerima Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) dipimpin Ketuaanya Adrian Djaeni di ruang kerjanya Lantai III, Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (11/6).

Kedatangannya ke DPR dalam rangka memperkenalkan diri Pengurus INI yang baru setelah menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Bali 23-24 Mei lalu. KLB digelar sebagai upaya untuk mencari penyelesaian adanya dualisme INI, dihadiri 1600 orang, yang menggunakan hak memilihnya 1.009 orang dan mendapatkan dukungan 83% dalam satu kali putaran. Periode sebelumnya, kata Djuani, dirinya juga menjabat sebagai Ketua Umum.

Namun di sisi lain, ada INI lain dibawah kepemimpinan Ketua Umumnya Sri Rahma Chandrawati dan Pramono hadir membuka Rapat Pleno INI tanggal 24 Mei 2013 lalu. Pramono juga mengaku tidak mengetahui adanya dualisme kepengurusan INI tersebut, setelah hadir baru mengetahui adanya

dua kubu organisasi notaris tersebut.

Lebih lanjut Pramono mengharapkan perlu ada ketegasan dari sikap pemerintah mana yang diakui sebagai wadah tunggal notaris Indonesia. Bagaimana pun profesi notaris adalah profesi yang sangat penting. “Hampir semua kegiatan yang ada unsur bisnis atau

hukum pasti melibatkan notaris,” tegasnya.

Untuk itu dia menegaskan kembali, jangan terlalu lama terkatung-katung dualisme INI tersebut dan harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Apalagi lanjutnya, sekarang sedang dilakukan pembahasan revisi UU Notaris dimana soal wadah tunggal bisa dimasukkan dalam rumusan UU.

“Bagi DPR selama itu tidak bertentangan dengan UU lainnya kami tidak keberatan. Yang juga penting, mereka harus menyelesaikan sendiri persoalannya. Jangan kemudian menggunakan lembaga DPR atau pemerintah ikut campur. Mereka harus selesaikan sendiri sesuai AD/ART yang dimiliki INI,” jelas Pramono.

Saat ditanya sikap DPR, politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, karena notaris merupakan organisasi profesi sebaiknya tidak masuk dalam wilayah politik. Dengan demikian wadah tunggal merupakan alternatif penyelesaian masalah ini. “Wadah tunggal sudah benar, seperti halnya dokter dengan organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI),” tambah Pramono menegaskan. (mp)/foto:iwan armanias/parle.



# KY Patut Periksa Hakim Vonis Anak 11 Tahun

Anggota Komisi III DPR RI Edi Ramli Sitanggang mendukung Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa hakim tunggal Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Sumut yang telah memvonis anak yang belum berusia 12 tahun. Keputusan hakim tersebut jelas bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

“Kita dukung KY untuk memeriksa hakim ini. DY ini kan masih anak-anak, walaupun mencuri tapi dia tetap tidak boleh dibawa ke persidangan. Ada cara tersendiri yang diatur UU, harusnya hakim tahu,” katanya di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/13).

Ia juga mempertanyakan pemahaman penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan petugas di rutan terhadap keputusan MK yang telah menerima uji materi UU Penga-



Anggota Komisi III DPR RI Edi Ramli Sitanggang.

dilan Anak. Majelis hakim di MK telah mengubah batas usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana, semula minimal 8 tahun menjadi 12 tahun.

“Kita pertanyakan kepada MA apakah hal ini sudah dipahami oleh

para hakim di seluruh pengadilan. Polisi dan Jaksa seharusnya juga tidak memproses kasus ini secara pidana, termasuk anak tidak bisa ditahan di rutan dewasa. Saya fikir ini masalah pemahaman aparat,” tandas wakil rakyat dari dapil Sumut III ini. Ia menyebut akan mempertanyakan hal ini kepada institusi terkait yang semuanya adalah mitra kerja Komisi III.

DY siswa SD divonis hakim Roziyanti bersalah karena mencuri telepon genggam dan laptop. Ia divonis 2 bulan 6 hari sama dengan masa penahanannya. Berdasarkan pasal 5 UU Pengadilan Anak, apabila anak berumur 12 tahun ke bawah yang melakukan tindak pidana, dikembalikan ke orang tua/wali atau diserahkan kepada Kementerian/Dinas Sosial untuk dibina. (iky) foto:wahyu/parle

## DPR Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK



Ketua DPR Marzuki Alie menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012 dari Ketua BPK Hadi Poernomo.

Ketua DPR Marzuki Alie menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012. Laporan diberikan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo dalam Sidang Paripurna DPR, di Gedung Nusantara II, Selasa (11/6).

“Untuk menindaklanjuti laporan ini, akan diteruskan ke

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Diharapkan laporan ini dapat menjadi masukan yang berharga untuk DPR, khususnya Komisi-komisi di DPR untuk mempelajari, membahas dan menindaklanjutinya dalam rangka tugas pengawasan dan anggaran melalui rapat kerja ataupun rapat dengar pendapat dengan mitra kerjanya,” ujar Marzuki usai mendengar paparan Hadi Poernomo.

Dalam laporannya, Hadi menyatakan bahwa sebelumnya BPK telah menyampaikan laporan secara tertulis pada 28 Mei yang lalu. Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN oleh pemerintah pusat.

“Atas LKPP tahun 2012, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion). Opini ini sama dengan opini yang diberikan BPK atas LKPP tahun 2011. Pada tahun 2012, pemerintah telah melakukan perbaikan yang signifikan dengan melakukan peningkatan ketertiban dalam inventarisasi, penilaian dan pencatatan aset tetap dan lainnya,” papar Hadi.

Pada tahun 2012, tambah Hadi, jumlah Kementerian Negara/Lembaga (KL) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK telah meningkat menjadi 69 KL dari 67 KL pada tahun 2011. Sedangkan KL yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Tidak

Memberikan Pendapat (TMP) pada tahun 2012 masing-masing sebanyak 22 dan 2 KL.

Namun BPK masih menemukan adanya empat permasalahan dalam pemeriksaan LKPP 2012 yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPP. Permasalahan tersebut merupakan gabungan ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kelemahan sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pertama, pemerintah telah mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya dan belanja lain-lain dari untung/rugi dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2012, masing-masing sebesar Rp 2,09 triliun dan Rp 282,39 miliar. Namun pemerintah belum menghitung penerimaan/belanja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,” jelas Hadi.

Permasalahan kedua, terkait dengan penganggaran dan penggunaan belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial yang melanggar peraturan atau ketentuan yang berlaku, sehingga berindikasi merugikan negara.

Berikutnya, pemerintah belum menelusuri keberadaan aset eks BPPN sebesar Rp 8,79 triliun, serta belum menyelesaikan penilaian atas aset properti eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sebesar Rp 1,12 triliun menjadi temuan ketiga BPK.

Permasalahan yang terakhir, BPK menemukan perbedaan laporan pemerintah terkait dengan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dengan nilai perbedaan sebesar Rp 8,15 triliun. Pada akhir tahun 2012, pemerintah melaporkan SAL sebesar Rp 70,26 triliun, namun laporan SAL ini masih berbeda dengan rincian fisik SAL.

“Empat permasalahan tersebut harus menjadi perhatian pemerintah untuk mengambil langkah-langkah perbaikan, agar ke depan permasalahan yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan menjadi semakin berkurang, dan tidak menjadi temuan berulang yang dapat mengganggu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” kata Hadi.

Terkait dengan penerimaan pajak, BPK melihat penerimaan pajak selama periode lima tahun terakhir (2008-2012), realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target dan hanya berkisar 94,31%-97,26% dari target APBNP. Sedangkan pada tahun 2012, realisasi penerimaan pajak hanya sebesar Rp 835,83 triliun, atau kurang Rp 49,20 triliun dari target APBN-P sebesar Rp 885,03 triliun.

“Secara akumulatif dari tahun 2009-2012 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target APBN-P sebesar Rp 136,24 atau dari APBN sebesar Rp 233,44 triliun,” tukas Hadi. (sf) foto:wahyu/parle.

## DPR Dorong Pembentukan Kaukus Ekonomi Hijau



Anggota DPR Satya W. Yudha berdialog dengan peserta Royal College of Defence Studies (RSDS) mengenai perubahan iklim.

Sejumlah anggota DPR berniat menggalang dukungan membentuk Kaukus Ekonomi Hijau (KEH). Pasalnya, Kaukus tersebut merupakan wujud kepedulian anggota Parlemen dalam

menyikapi perubahan iklim nasional.

“Saya telah berusaha menggalang sejumlah anggota DPR dari lintas Komisi untuk membentuk Kaukus

Ekonomi Hijau (KEH), bahkan telah bergulir sejak akhir 2012 lalu,” ujar Anggota DPR Satya W. Yudha dari Partai Golkar sebagai penggagas Kaukus Ekonomi Hijau kepada Parlemen, di Gedung DPR RI, baru-baru ini.

Kaukus Ekonomi Hijau (KEH), lanjutnya, merupakan bentuk komitmen bersama untuk memperkuat peran DPR dalam menjalankan pembangunan rendah karbon (*low carbon growth*).

Satya memberikan gambaran bahwa terdapat masalah dalam upaya mewujudkan tujuan Kaukus Ekonomi Hijau (KEH) tersebut. Antara lain, masih adanya ketergantungan konsumsi yang cukup tinggi terhadap bahan bakar fosil.

Akibat dari itu, Indonesia juga menjadi negara penghasil emisi yang besar di dunia. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia sudah mulai mengadaptasi



kebijakan-kebijakan mengenai lingkungan hidup yang diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan ekonomi nasional.

“Langkah konkret salah satunya adalah dengan mengadopsi NAMA (*Nationally Appropriate Mitigation Action*) yang merujuk pada serangkaian tindakan kebijakan dan aksi pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca,” ujar Satya sesuai memberikan pemaparan presentasi kepada

*Royal College of Defence Studies (RSDS)* mengenai perkembangan perubahan iklim (*climate change*) di Indonesia.

Sayangnya, lanjutnya, target kebijakan NAMA tersebut masih sulit diverifikasi dikarenakan tidak adanya informasi yang komprehensif tentang metode, evaluasi dan kemajuan yang telah dicapai dalam komitmen menurunkan emisi karbon sampai dengan 26% pada 2020 sesuai yang dicanangkan Presiden SBY pada 2009.

Soal Satgas REDD+ sebagai lembaga task force, menurut Satya harus segera ditentukan konterpart-nya di DPR. Karena hingga saat ini REDD+ masih dikelola oleh gugus tugas yang belum memiliki kekuatan hukum. “Perlu segera memberikan kepastian hukum terhadap status institusi task force REDD+ tersebut, sehingga tugas dan fungsinya bisa berjalan optimal, apalagi jika sudah memiliki konterpart di DPR,” jelasnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.

## BK Agendakan Rapat dengan Sekjen dan Pimpinan DPR

Badan Kehormatan DPR RI mengagendakan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal dan Pimpinan DPR dalam waktu dekat. Topik utama pembicaraan adalah soal upaya meningkatkan kehadiran anggota dan kebijakan lain dalam menjaga citra dewan.

“Setelah dengan Pimpinan Fraksi kita juga akan rapat dengan Sekretaris Jenderal kemudian dengan Pimpinan DPR. Spirit kita adalah bagaimana upaya menjaga marwah anggota dewan bisa berhasil,” kata Ketua BK, Trimedy Panjaitan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/13).

Agenda lain yang akan dibicarakan dengan Pimpinan DPR adalah permintaan agar setiap rapat paripurna jangan hanya dihadiri oleh satu orang pimpinan saja. “Seperti rapat paripurna hari ini hanya ada Pak Marzuki, kalau bisa di depan itu ada 2 atau 3 pimpinan-lah,” lanjutnya.

Sedangkan dengan Sekjen, BK menginginkan rekapitulasi absensi sidik jari yang sudah diterapkan sejak beberapa waktu lalu segera diserahkan. Menurutnya data tersebut

akan melengkapi absensi manual yang sudah diterima BK setiap selesai rapat paripurna.

Pada bagian lain Politisi FPDIP ini menerangkan BK bersama Pimpinan Fraksi telah menyepakati disamping meningkatkan kehadiran juga akan mengimbau anggota dewan untuk mengenakan jas dalam setiap rapat paripurna.

“Dalam tata tertib aturannya kan pakaian resmi, ini kita sepakati jas. Sifatnya himbuan saja dan tidak ada sanksi. Kalau untuk anggota dewan yang perempuan menyesuaikan saja, tidak harus berkebaya nanti repot ke salonnya,” demikian Trimedy. (iky) foto:ry/parle



Ketua Badan Kehormatan DPR Trimedy Panjaitan.

## RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara Perlu Argumentasi Kuat

RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara (Komcad) tengah mendapat perhatian dari masyarakat. Upaya pemerintah memasukan Rancangan Undang - undang Komponen Cadangan (Komcad) agar disahkan menjadi UU harus disertai argumentasi kuat. Kebutuhan Komcad sesuai kebutuhan dan karakter ancaman pertahanan Indonesia. Di sisi lain, RUU itu bersih dari kepentingan politik menuju Pemilu 2014.

Demikian benang merah pendapat anggota Komisi I DPR Sidarto Danusubroto, pengamat militer dan intelijen Andi Widjayanto dan Koordinator Eksekutif Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, dalam Forum Legislasi bertema “Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan Pertahanan Negara (RUU KCPN) di Press Room, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6).

Sidarto minta pemerintah jangan dulu memikirkan pertahanan negara melalui militerisasi sipil. Profesional TNI harus prioritas dibenahi melalui perbaikan kesejahteraan prajurit dan peningkatan alutsista.

“RUU Komcad ini memang belum sempurna dan belum terlalu mendesak. Kalau kita membangun suatu sistem pertahanan, seharusnya kom-



Anggota Komisi I DPR Sidarto Danusubroto dalam acara Forum Legislasi yang membahas tentang RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara.

ponen yang utama harus diperkuat terlebih dahulu,” katanya.

Kondisi yang ada saat ini, sambung legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut, kelengkapan alutsista yang seharusnya dipenuhi, ternyata baru sekitar 28 persen dari batas minimum, dan tahun depan diperkirakan naik menjadi 38 hingga 40 persen. “Pertanyaan yang muncul, kenapa anggaran yang disediakan untuk Komcad, tidak dipergunakan untuk memperkuat komponen utama yang baru mencapai sepertiga dari batas minimum?” tanya Sidarto.

“Kemudian, kenapa kita mencoba membangun Komcad yang arahnya pada perang tradisional yang belum terpetakan? Padahal, perang modern itu mengedepankan teknologi,” imbuh mantan Kapolda Jawa Barat ini.

Hal lain yang menjadi sorotan, lanjut Sidarto, pada Pasal 8 disebutkan bahwa golongan yang diwajibkan ambil bagian dalam Komcad adalah pegawai negeri sipil, pekerja, atau buruh. “Menurut pasal 8, yang wajib kena Komcad adalah PNS, pekerja, dan buruh. Apabila menolak, golongan itu diancam hukuman kurun selama satu tahun yang diatur dalam pasal 38. Lantas, bagaimana dengan pengusaha, anggota DPR, pengacara, dokter yang tidak masuk dalam ketiga golongan tersebut?” tambahnya.

Lalu pada pasal 14 yang mengatur mengenai sumber daya alam, dan sumber buatan, itu adalah milik swasta yang bisa diambil alih untuk kepentingan

an Komcad. “Jika itu disahkan, tentu berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, yang melakukan perampasan atas nama Komcad,” kata Sidarto.

Ia mengatakan kekuatan alutsista yang dibangun pemerintah masih jauh dari kekuatan pokok minimum (*Minimum Essential Force/MEF*), yakni baru mencapai 38 persen pada tahun 2014. Hal ini sangat jauh dari harapan jika ingin mengulang kejayaan TNI pada masa lalu. Karena itu, ia menegaskan pemerintah lebih prioritas membenahi TNI. “Saya setuju Komcad jika komponen utama sudah dibangun sesuai harapan,” kata dia.

Di sisi lain, Sidarto menyayangkan DPR telah memasukan RUU Komcad pada pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013. RUU ini tak lebih penting dibandingkan pembahasan tentang pendidikan dan kesehatan. “Prolegnas lah yang seharusnya memilah mana yang perlu dan tidak,” ujar dia.

Haris mengkhawatirkan RUU Komcad akan menimbulkan gejala kecemburuan di TNI. Prioritas pertahanan lebih terkonsentrasi pada memilliterisasi sipil dibandingkan upaya meningkatkan profesionalisme tentara.

Secara terpisah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) setuju RUU Komcad dengan catatan tidak bertentangan dengan kemanusiaan.

Menurut Andi, RUU lebih identik dengan militerisasi rakyat ketimbang

fokus pada penyiapan secara dini sumber daya sarana infrastruktur untuk ke depan. “Pemerintah fokus untuk membentuk komponen cadangan yang karakternya bukan warga negara yang dilatih, tapi membentuk komponen cadangan yang karakternya adalah sumber daya, sarana, dan prasarana,” katanya.

Terhadap perdebatan mengenai perlu atau tidaknya RUU Komponen Cadangan, Andi mengungkapkan bahwa RUU tersebut merupakan keharusan dalam sistem pertahanan semesta yang dirancang dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal tersebut mengharuskan negara membentuk empat hal, yakni komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung untuk pertahanan militer, dan unsur utama untuk pertahanan non militer.

“Pemerintah harus buat argumen yang kuat bahwa Komcad bukan berorientasi militerisasi rakyat, Komcad tak terkait politik 2014, Komcad memang diperlukan untuk memperkuat TNI dan Komcad tak memboroskan sumber daya,” kata Andi.

Menurut dia, Komcad perlu disiapkan secara dini, namun pengadaannya sesuai karakter kebutuhan dan ancaman. Pemerintah harus punya analisis terhadap ancaman perang yang mungkin akan dihadapi Indonesia di masa akan datang.

Itu artinya, Komcad bukan disamaratakan wajib militer. Pertahanan bukan berarti memberdayakan sipil, melainkan berorientasi pada pemanfaatan sumber daya, seperti aset yang dimiliki lembaga lain sesuai kebutuhan antisipasi ancaman. “Penyiapan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis ancaman yang akan terjadi di masa datang,” kata dia.

Ia menyontohkan realitas bahwa sekarang Indonesia sedang menghadapi perang cyber dan teknologi digital. “Tentunya, Komcad yang dibutuhkan adalah ahli teknologi dan cyber. Jika butuh pesawat tentunya siapa dan perusahaan mana yang punya pesawat yang diberdayakan,” jelas dia. (as)/foto:odjie/parle/iw.





# Baleg Minta Semua Pihak Pahami UUD 1945

Terkait Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 92/PUU-X/2012 yang mengabulkan permohonan *Judicial Review* Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), Rabu (11/6). Badan Legislasi DPR RI (Baleg) menggelar rapat pleno yang juga dihadiri seluruh Legal Drafter DPR dan Tenaga Ahli Baleg di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Jakarta.

Ketua Baleg, Ignatius Mulyono yang memimpin rapat tersebut menyatakan, bahwa dalam menyikapi Keputusan MK, terlebih dahulu kita harus bisa memahami sebetulnya sejauh mana pemahaman DPD terhadap Keputusan MK tersebut.

“Karena jika nanti bayangan yang dimiliki DPD itu terlalu berlebihan, tentunya kita juga akan mengalami kesulitan didalam melakukan pembahasan revisi UU MD3,” jelas Mulyono.

Mulyono meminta kepada seluruh *Legal Drafter* DPR dan Tenaga Ahli Baleg serta Anggota Baleg untuk paham betul apa yang termuat dalam UUD 1945.

“Jangan kita mencoba keluar dari rumusan-rumusan yang sudah ada di UUD 1945. Pasal 20 ayat (2) UUD kita jelas bahwa yang menyusun UU itu DPR bersama pemerintah, sehingga maknanya keputusan untuk peresmian suatu RUU menjadi UU itu ditangan DPR,” papar politisi Fraksi Partai Demokrat.

“Ini kuncinya, tidak boleh ada pihak-pihak yang mau mengakselerasikan terhadap Keputusan MK, kita tetap menggunakan dasar itu. Kita letakkan dimana posisi DPD itu. Tapi tidak mengikuti sebagai pihak yang mengambil keputusan,” tambahnya.

Maksudnya, DPD bukan pihak yang mengambil kepu-



Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius Mulyono.

tusan dan DPD tidak bisa mengajukan pendapat didalam Rapat Paripurna DPR RI. “Mau diputuskan merah, kuning, hijau oleh DPR bersama pemerintah, itu hak sepenuhnya sesuai UUD 1945,” kata Mulyono.

Menurutnya, DPR harus bisa memberikan suatu rumusan yang jelas, tepat dan tidak keliru terhadap tugas dan tanggung jawab DPD, bahwa wilayah DPD mencakup apa saja.

Penentuan anggaran perimbangan keuangan pusat dan daerah, menurut Mulyono DPD bisa dilibatkan. Tetapi jika mengenai APBN, DPD hanya sekedar memberikan masukan.

“Saya minta, kita semua bergerak dalam koridor UUD 1945. Keputusan MK sudah final dan siapapun tidak bisa merubah, tapi terjemahannya tidak boleh keluar dari koridor UUD 1945, karena MK mengambil keputusan berdasarkan UUD 1945,” tegas Mulyono. (sc)/foto:odjie/parle/iw.

## Tuntutan Penolakan Kenaikan Harga BBM Disampaikan ke Fraksi-fraksi DPR

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, penolakan kenaikan harga BBM yang disampaikan Petisi 28 dan sejumlah ormas akan disampaikan ke Fraksi-fraksi DPR. Sekarang ini pembahasannya baru di Badan Anggaran, setelah itu akan dibahas kembali oleh Komisi-komisi.

“Tuntutan ini akan disampaikan secara resmi melalui disposisi Pimpinan DPR kepada Fraksi-fraksi untuk menjadi perhatian dan sikapnya,” tegas Pramono Anung ketika menerima sikap politik Petisi 28 dan sejumlah ormas yang mendesak Pimpinan DPR untuk menolak kebijakan menaikkan harga BBM, di Gedung Nusantara III

DPR, Rabu (13/6).

Kepada Pramono Anung yang didampingi anggota Komisi VIII DPR Ace Hasan Sjadzily, Haris Rusly dari Petisi 28 juga menuntut DPR untuk memperlakukan kembali kebijakan subsidi untuk kesejahteraan rakyat. Seperti subsidi pendidikan, subsidi kesehatan,



Wakil Ketua DPR Pramono Anung menerima penolakan kenaikan harga BBM yang diwakili Petisi 28 dan sejumlah ormas.

pujuk, listrik dan subsidi energi.

Mengenai alasan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM untuk dialihkan membantu rakyat miskin,

dinilai sebagai kebohongan. Faktanya, bantuan untuk rakyat miskin diambil dari program hutang luar negeri **cash transfer**. Anggaran untuk beras miskin (raskin) dan PNPM berasal dari Bank

Dunia dan ADB.

Saat ditanya tindak lanjut sikap fraksi atas penolakan kenaikan harga BBM ini, Pramono mengatakan tergantung dari pandangan mereka sebab dalam masalah ini domainnya ada di Fraksi-Fraksi. Ia menyebutkan bahwa rencana untuk memutuskan masalah kenaikan harga BBM ini akan dilangsungkan dalam Rapat Paripurna pekan depan.

Kenaikan BBM domain pemerintah apakah akan dinaikkan atau tidak. Yang menjadi tugas DPR ini berkaitan dengan kompensasi yang harus diberikan dan pemerintah sudah mengajukan empat alternatif diantaranya BLSM, bantuan beras dan siswa miskin serta infrastruktur pedesaan.

“Sekali lagi domain kenaikan BBM ada di Pemerintah, tetapi soal kompensasi dan dampak sosial inilah yang harus mendapat persetujuan DPR,” tegas Pimpinan DPR Korinbang ini menambahkan. (mp)/foto:iwan armanias/parle.

## Kemitraan Global Pondasi Dasar Capai Pembangunan Berkelanjutan

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Ida Ria Simamora menyatakan bahwa kemitraan global merupakan pondasi dasar untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kemitraan global juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dan terbelakang.

Hal itu dikatakannya ketika mewakili BKSAP dalam acara simposium *The Preparing for the 2014 Development Cooperation Forum Ethiopia High Level Symposium*, di *UN Economic Commission for Africa (UNECA) Conference Center, Addis Ababa – Ethiopia (6-7/6)*. Indonesia menjadi salah satu dari 12 negara anggota Inter Parliamentary Union (IPU) yang terpilih untuk mengikuti simposium ini.

“Kemitraan global harus diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan,



Anggota BKSAP DPR Ida Ria Simamora.

mempromosikan pembangunan berkelanjutan serta memastikan kesejahteraan bagi semua golongan masyarakat. Kemitraan global juga bisa melibatkan seluruh *stakeholder*

termasuk masyarakat, parlemen, *civil society organization* dan diikuti oleh proses konsultasi yang inklusif, serta disesuaikan dengan strategi pembangunan nasional di masing-masing negara,” jelas Ida Ria.

Peranan swasta dan bisnis, tambah Ida, juga memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia mencontohkan peran swasta di Indonesia yang telah melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk memberdayakan masyarakat lokal melalui berbagai kontribusi. Kontribusi itu diantaranya dengan dibukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat, pelatihan dan peningkatan kapasitas.

“Indonesia memiliki regulasi yang mengharuskan setiap perusahaan swasta untuk menggunakan konten lokal, sebagai pendorong pertumbuhan



an ekonomi di daerah. Kolaborasi efektif antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan sektor privat merupakan pondasi dasar menuju suksesnya *Millenium Development Goals (MDGs) 2015*,” tambah anggota Komisi VI ini.

Terkait dengan pencapaian MDGs, Ida menyatakan bahwa Indonesia memiliki komitmen serius untuk mencapai MDGs 2015. DPR membentuk panja khusus menangani MDGs. Hingga saat ini, nilai Ida, Indonesia telah

berhasil mencapai beberapa target, di antaranya penurunan angka kemiskinan, peningkatan sumber air bersih, peningkatan layanan kesehatan, dan kenaikan angka partisipasi perempuan di sektor publik dan pendidikan.

Dalam acara bertema ‘*Renewed Global Partnership for Development for a Post-2015 Era*’ itu, juga membahas mengenai kerangka kerjasama antara negara Selatan-Selatan yang meliputi negara-negara berkembang. Kerjasama antara sesama negara

berkembang dianggap sebagai salah satu sumber alternatif pembiayaan dana pembangunan global, disamping adanya bantuan dari negara maju atau donor tradisional.

Wacana ini disambut baik oleh sebagian besar peserta simposium. Di masa depan, partisipasi *emerging countries* seperti Indonesia, China, India, dan negara lainnya diharapkan dapat ikut mendukung tercapainya kemitraan global yang lebih efektif. (sf)/foto:Iwan Armanias/parle.

## Bangladesh Pasar Potensial Produk Indonesia

Dengan penduduk 150 juta jiwa, Bangladesh merupakan pasar potensial bagi produk-produk ekspor dalam negeri. Indonesia bisa mengambil kepentingan dari hubungan politik dan ekonomi dengan Bangladesh.

Demikian disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie usai menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Bangladesh yang baru 3 bulan bertugas di Indonesia, Nazmul Quaunine, Rabu (12/6) di ruang kerjanya.

“Kita dengan Bangladesh relatif mempunyai keuntungan yang lebih besar. Nilai ekspor perdagangan kita satu miliar dolar lebih ke Bangladesh. Justru Bangladesh relatif kecil sekali ekspornya ke Indonesia. Artinya, bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi dalam negeri,” ungkap Marzuki.

Dalam pertemuan singkat itu, Ketua DPR dan Dubes Bangladesh bertukar informasi seputar sistem politik yang dianut di kedua negara. Bila di Indonesia menganut presidensial, Bangladesh parlementer. Dan yang menarik, dari 345 kursi di parlemen Bangladesh, 260 kursi dikuasai partai sekuler.

Sisanya, 40 kursi dikuasai partai-



Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Bangladesh Nazmul Quaunine.

partai kecil lewat pemilu. Sementara 45 kursi tambahan dipilih untuk kuota perempuan tanpa melewati seleksi pemilu. 45 kursi perempuan itu dipilih oleh partai besar. “Artinya, partisipasi politik perempuan di Bangladesh masih rendah. Itu yang saya nilai,” tutur Marzuki.

Dalam pertemuan tersebut, Dubes Bangladesh meminta dukungan Ketua DPR, agar bisa menjalankan tugasnya

dengan baik selama di Indonesia. Peningkatan hubungan kedua negara juga diharapkan terus meningkat dan saling menguntungkan. “Beliau berkeinginan untuk meningkatkan hubungan dengan Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Kami ngobrol bagaimana sistem di Bangladesh. Dan beliau juga bertanya tentang sistem di Indonesia,” ujar Marzuki. (mh) foto:wahyu/parle

# Dampak Finansial dan Sosial Pengurangan Kuota Haji Cukup Besar



Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Anggito Abimanyu.

Rencana pemerintah Arab Saudi mengurangi kuota haji Indonesia menurut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Anggito Abimanyu sangat berdampak bagi Indonesia, baik itu dampak finansial maupun sosial. Hal tersebut dikemukakan Anggito

kepada wartawan Rabu (12/6) usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI.

“Dampak finansial, contohnya kerugian yang akan ditanggung oleh biro perjalanan haji swasta, nilainya mencapai 300-350 Miliar. Belum lagi, biaya pemondokan, transport, katering, buku manasik dan kontrak senilai 300 miliar dengan pemerintah Arab Saudi yang sudah dibayar di tahap pertama,” jelas Anggito.

Ditambahkan Anggito, untuk kerugian sosial yang dimaksud Anggito adalah berupa penurunan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara haji, terutama calon jemaah haji yang gagal berangkat pada tahun ini. Meski demikian menurut Anggito, pengurangan itu tidak hanya dikenakan pada jemaah Indonesia saja, melainkan juga pada Negara-negara lain yang jumlah keseluruhannya mencapai

20 persen.

“Pengurangan kuota jemaah haji untuk seluruh dunia adalah sekitar 20 persen, itu terjadi karena proses renovasi yang dilakukan pemerintah Arab Saudi di Masjidil Haram belum rampung. Sehingga daya tampung Masjidil Haram yang awalnya sekitar 48 ribu jemaah, namun sekarang menjadi 22 ribu jemaah dalam satu jam nya,” ungkap Anggito.

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi VIII, Ida Fauziyah mengatakan bahwa pihaknya akan tetap minta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk terus mengupayakan lobi kepada Pemerintah Arab Saudi agar tidak terjadi pemotongan, dan seandainya memang harus ada pemotongan jumlah kuota jemaah haji Indonesia tidak sebesar yang direncanakan pemerintah Arab Saudi, sebesar 20 persen. (Ayu) Foto: Ry/Parle.

## Komisi V DPR Kritisi Kondisi Jalan Nasional

Komisi V DPR mengkritisi kualitas jalan nasional yang buruk dan kerap menimbulkan kecelakaan bagi para pemakai jalan. “Sudah lebih lima tahun selama di Komisi V DPR, Dirjen Bina Marga tidak menunjukkan kinerjanya, kualitas jalan nasional seakan jadi sumber malapetaka. Berdasarkan data, banyak kecelakaan terjadi di Jalan nasional dibandingkan jalan lainnya,” ujar Anggota DPR Rendy Lamadjido saat RDP dengan Dirjen Bina Marga, Kepala BPJT Kementerian Pekerjaan Umum, di Gedung Nusantara, Rabu, (12/6).

Menurut Rendy, saat RDP dengan Kepolisian bahkan dirinya sempat meminta pihak kepolisian untuk melakukan rekayasa lalu lintas di jalan nasional. “Selain banyak korban lalu lintas, Jalan nasional sekarang ini sudah mulai stagnan dan lamban, sehingga misi PU



Anggota Komisi V DPR Rendy Lamadjido.

yang meningkatkan aksesibilitas tidak akan tercapai,” jelasnya.

Dia menambahkan, dirinya sudah meminta data-data jalan nasional namun sampai sekarang tidak pernah diberikan oleh pemerintah. “Jalan itu ada batas maksimal, kapasitas pendukung dan umur jalan tersebut,”

tambahnya.

Dia mencontohkan, jalan Pantura tiap tahun mengalami kerusakan dan terus diperbaiki. “Kemana itu Litbang dan mengapa tidak ada observasi jalannya, apabila perlu tingkatkan hot-mix dari 20 cm menjadi 40 cm, kalau daya dukung kurang harus dibeton,” ujarnya.

Ini, lanjutnya, seolah-olah jadi proyek kementerian semata. Karena itu, kegagalan jalan itu dikarenakan biaya *maintenance* dan observasi yang tidak dilakukan. “Kalau itu dilakukan secara sistematis tentu kerusakan jalan bisa dikurangi,” katanya.

Rendy mengatakan, hampir semua Bupati mengeluhkan jalan nasional yang hancur bahkan, jalan lintas barat





trans Sulawesi rusak parah. “Baik buruk jalan tergantung yang mengawasinya bahkan jalan itu seharusnya sudah didesain berapa lalu lintas yang melewati tempat tersebut, Jangan sampai lalu lintas harian rendah maka kualitas jalan dibuat rendah,” tandasnya.

Hetifah dari Fraksi Partai Golkar mengatakan, infrastruktur merupakan cermin kinerja dari pemerintah. karena itu perlu didorong pencapaian infrastruktur secara maksimal. “Jalur lalu lintas selatan di Kalimantan banyak terputus karena itu perlu dibangun koneksi selain jalan seperti jembatan,”

ujarnya.

Di sisi lain, investasi jalan juga harus memperhatikan kawasan hutan sekitarnya jangan sampai investasi ratusan miliar tetapi tidak terkoneksi. (si) *foto:Iwan Armanias/parle*

## Firman Subagyo : Pemerintah Harus Perhatikan 10 Komoditas Strategis Pertanian



Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo.

Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo mengatakan bahwa Pemerintah harus memperhatikan dan memberikan dukungan terhadap komoditas-komoditas strategis pertanian yang bisa memberikan dukungan terhadap pendapatan negara.

“Pemerintah harus memperbaiki tata kelola keuangan negara, Pemerintah tidak punya kebijakan-kebijakan anggaran kepada sektor yang harus mendapatkan dukungan prioritas,” tegasnya, saat Rapat Kerja yang dipimpin Ketua Komisi IV Romahurmuziy, dengan Menteri Pertanian Suswono, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (12/6).

Firman menjelaskan merosotnya penerimaan-penerimaan, antara lain salah satunya merosotnya pendapatan pajak, “ini konsekuensi dari penegakan hukum, sehingga penurunan pajak itu sangat drastis turunnya,” katanya.

Oleh karena itu, katanya harus ada solusi bersama, bahwa dalam Undang-undang No.12 Tahun 1992 Tentang Sistem

Budidaya Tanaman dan Undang-undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, mengisyaratkan bahwa 10 komoditi strategis salah satunya adalah tembakau.

Menurutnya, posisi tembakau dan petani tembakau ada di persimpangan jalan, kalau dilihat kontribusi negara mencapai 100 Triliun dari target cukai yang ditetapkan pemerintah 87 Triliun, dan kemudian posisi produksi petani tembakau yang memberikan dampak pada pendapatan negara, penyerapan tenaga kerja, juga termasuk kesejahteraan petani dan pendapatan asli daerah.

Namun, disisi lain catatannya sampai hari ini, tembakau impor mencapai 120 ribu ton. “ini sudah diambang batas bahwa sebentar lagi kita akan mengalami defisit di dalam neraca perdagangan kita,” katanya.

Bicarakan dengan Presiden, jangan terlalu dianiaya petani tembakau, karena kontribusi kepada negara ternyata luar biasa.

Dia membenarkan kajian riset mengatakan dari Kementerian Kesehatan yang mengatakan bahwa kematian akibat menghisap tembakau atau rokok mencapai sekian persen. Tetapi itu tidak menjadi sebuah alasan. Jadi artinya tidak serta merta bahwa orang merokok itu meninggal.

Lebih lanjut, Menteri Pertanian harus menyampaikan hal ini kepada Presiden, “Komoditi-komoditi strategis yang bisa memberikan dukungan terhadap pendapatan negara, apakah akan diposisikan seperti ini,” ujarnya.

Dia mengingatkan dulu pernah terjadi pada cengkeh, ketika cengkeh kita *oversupply* kemudian kita tidak menanam cengkeh akhirnya hari ini kita mengimpor cengkeh sampai 40 ribu ton. “Ini sangat ironis bagi kebijakan APBN, kalau komoditi-komoditi strategis pertanian yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara akhirnya diampunasi oleh kebijakan pemerintah itu sendiri,” ungkapnya.

Selanjutnya, politisi Partai Golkar ini mengingatkan terhadap komoditi-komoditi strategis dengan adanya perjanjian *Mutual Recognition Agreement (MRA)* yang akan ditandatangani Pemerintah. Menurut Firman hal ini harus mendapatkan kajian yang serius dari aspek neraca perda-

gangannya. Ketika dari aspek neraca perdagangan defisit, maka sebaiknya pemerintah harus mengambil sikap.

“Jangan sampai MRA yang akan ditandatangani akhirnya juga akan menimbulkan defisit negara, akhirnya nanti posisi APBN akan semakin merosot dan defisa negara dikuras hanya untuk pemenuhan produk impor yang akan digunakan kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.

Firman juga khawatir jika ini sampai bulan Ramadhan dan hari raya lebaran, kita tidak bisa mengendalikan komoditi

strategis ini. Dia menjelaskan ketika kelangkaan kedelai, kerugian negara mulai lebaran hingga akhir tahun mencapai Rp.400 Milyar. “Ini akibat kebijakan Kementerian Perdagangan memberikan kebijakan 0% terhadap kedelai impor,”

Kalau posisi ini terjadi kepada komoditi daging atau beras, karena konsekuensi anggaran tanaman pangan dipangkas akhirnya semua akan dilakukan impor. “Oleh karena itu perlunya Rapat Gabungan dengan mengundang Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian,” tambahnya. (as) foto:wahyu/parle

## GOPAC Gelar Workshop Pendanaan Politik dan Anti Pencucian Uang

Global Organization of Parliamentarian Against Corruption (GOPAC) menggelar workshop pendanaan politik dan anti Pencucian uang. Workshop tersebut terdiri atas 30-an anggota DPR RI dan berasal dari sejumlah alat kelengkapan seperti BKSAP, Komisi I, Komisi III dan Badan Kehormatan hingga Badan Akuntabilitas Negara (BAKN).

“Saya berharap anggota gugus tugas akan semakin luas, sehingga dalam konteks perjuangan pemberantasan korupsi, Parlemen dapat memberikan sumbangsih yang cukup signifikan,” jelas Wakil Ketua DPR Pramono Anung dalam siaran persnya kepada wartawan, di Jakarta, Kamis, (13/6).

Pramono mengatakan, workshop pendanaan politik dan pencucian uang ini merupakan kegiatan lanjutan work-



Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

shop pertama Gugus Tugas Tentang United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Desember lalu.

Kali ini gugus tugas akan menyoar tema yang memiliki relevansi isu yang akan dihadapi oleh para anggota

Parlemen, terutama menjelang tahun politik 2014.

“Gaung politik mulai terasa mendekati tahun 2014, tentu kampanye politik membutuhkan pendanaan. Tantangan kami kedepan bagaimana mensinergikan aspek pendanaan kegiatan politik agar tidak bertentangan dengan aturan yang ada, terlebih agar tidak masuk dalam kategori pencucian uang,” jelasnya.

Ketua BKSAP Surahman Hidayat mengatakan, workshop ini juga akan membuka ruang luas bagi komunitas organisasi internasional untuk hadir sebagai pengamat atau *observer* dan memberikan masukannya terhadap topik tersebut. (si) Foto: IW/Parle.

## Perusahaan Apapun Harus Tunduk Pada Penegakan HAM



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso didampingi beberapa anggota DPR menerima delegasi utusan khusus PBB untuk Bisnis dan HAM Prof. John G. Ruggie.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, yang perlu diambil pelajaran dengan kedatangan Utusan Khusus PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah semangat pendekatan kepada perusahaan-perusahaan multi nasional maupun perusahaan raksasa maupun perusahaan apapun, harus tunduk kepada penegakan HAM.

“Bahkan sudah saatnya dipikirkan, kepada perusahaan-perusahaan perlu dilakukan tidak hanya audit lingkungan tetapi juga audit HAM,” kata Priyo pada saat menerima Delegasi Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Bisnis dan HAM Prof. John G. Ruggie di Gedung DPR, Kamis (13/6).

Kehadiran John. G Ruggie dan rombongan juga didam-





pingi Direktur Eksekutif Pusat HAM Asean Marzuki Darusman, sedang Priyo didampingi antara lain Ketua Baleg Ignatius Mulyono, Wakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf dan anggota Poempida Hidayatulloh serta anggota Komisi VI Chairuman Harahap.

Lebih lanjut Priyo Budi Santoso mengatakan, John Ruggie adalah tokoh sentral PBB yang menggerakkan dengan gigih semangat hubungan prinsip pedoman HAM yang diberlakukan di semua negara baik negara maju maupun berkembang. "Semangat dalam pendekatan kepada perusahaan-perusahaan multi nasional raksasa, multi nasional dan perusahaan apapun yang menginvestasikan di bidang perminyakan, pertambangan maupun sektor adalah penegakan HAM," tegasnya lagi.

Hal tersebut sambung dia, sangat penting, jangan sampai terjadi sebuah negara sumber alamnya disedot secara ugulugalan oleh perusahaan raksasa, tetapi kemudian tidak memperhatikan aspek penanggulangan HAM.

Menurut Priyo, DPR segera akan menindaklanjuti masalah ini, dan telah dikemukakan dalam Konferensi Regional Asean pada pidato kunci bersama Marzuki Darusman selaku Direktur Eksekutif Pusat HAM Asean, untuk bersama-sama mencoba mengimplementasikan masalah tersebut.

Selain itu, kata Priyo, di parlemen sudah dipikirkan untuk membentuk Kaukus DPR-RI untuk masalah penegakan HAM dan bisnis, sehingga dipastikan nanti akan ada audit dari sisi HAM, atau audit HAM untuk perusahaan manapun, jika ingin beroperasi di Indonesia.

Sebelumnya Priyo menyampaikan penghargaan atas kehadiran John Ruggie sebagai tokoh yang gigih tak mengenal lelah menggerakkan kampanye besar-besar sehingga prinsip-prinsip pedoman dalam bisnis dan HAM diadopsi oleh PBB pada pertengahan 2011 lalu. "Ini tak lepas dari tangan dingin John Ruggie dan tim yang datang hampir di seluruh kawasan dunia," ujarnya. (mp) Foto: Wahyu/Parle.

## Dewan Akan Bentuk Tim Pemantau Pelaksanaan Amnesti TKI Arab Saudi

Terkait kerusuhan yang terjadi di KJRI Jeddah pada Minggu (9/6) lalu, Komisi IX DPR RI mendesak Kemenakertrans RI agar berkoordinasi dengan Kemenlu RI dan pihak terkait lainnya dalam memanfaatkan secara maksimal amnesti yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada para TKI, sehingga dapat memaksimalkan perlindungan terhadap TKI di Arab Saudi.

Hal tersebut merupakan salah satu butir kesimpulan rapat kerja Komisi IX dengan Menakertrans dan Menkes di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/6)

"Untuk itu, Komisi IX DPR RI akan melakukan Rapat Kerja dengan mengundang Kemenakertrans RI, Kemenkumham RI, Kemenlu RI, dan Kemenag RI pada hari Kamis, 13 Juni 2013, Pk. 10.00 WIB –selesai," kata Wakil Ketua Komisi IX, Irgan Chairul Mahfiz yang memimpin rapat tersebut.

Dijelaskan Irgan, bahwa Komisi IX DPR RI juga akan melakukan konsultasi dengan Pimpinan DPR RI dalam rangka pembentukan tim pemantauan pelaksanaan pemberian amnesti oleh Kerajaan Arab Saudi terhadap TKI yang *overstayer*.

Sebelumnya terjadi kerusuhan di KJRI Jeddah pada Ahad (9/6) sore. Ribuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mengamuk di depan gedung KJRI. Mereka juga melempari gedung KJRI dengan batu dan membakar tumpukan sampah dan kertas yang mengakibatkan kebakaran serius.

Kerusuhan tersebut dipicu aksi protes ribuan TKI yang mendatangi Konsulat untuk mengurus status imigrasi mereka. Sekitar 8.000 TKI berkumpul di luar Konsulat itu.



Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning didampingi Wakil Ketua Irgan Chairul Mahfiz.

Mereka mencoba untuk mengurus berkas imigrasinya yang selama ini berstatus sebagai pekerja asing ilegal di negara itu dalam menghadapi batas waktu yang diberikan Kerajaan Saudi untuk memulihkan status mereka atau mereka harus meninggalkan Saudi. Kebijakan pemutihan ini diberikan pemerintah Saudi sejak 11 Mei hingga 3 Juli 2013.

TKI yang hendak mengurus SPLP tersebut mengamuk lantaran loket tiket yang harusnya dibuka pukul 15.00 waktu setempat, Minggu (9/6), tak kunjung dibuka. Sejumlah TKI yang mulanya mengantri rapi mulai membakar pagar dan melempari kantor KJRI dengan batu. Satu orang tewas dalam kerusuhan ini. (sc) Foto: Odjie/Parle.



**Pimpinan dan Anggota DPR RI  
beserta Keluarga Besar Setjen DPR RI  
turut berduka cita atas wafatnya**



**H. Muhammad Taufiq Kiemas**  
Ketua MPR RI  
Periode 2009-2014

---

Lahir: Jakarta, 31 Desember 1942  
Wafat: Singapura, 8 Juni 2013